



AGENDAKAN PANGGIL KAI Komisi A Tegaskan Tak Boleh Langgar Prosedur

YOGYA (KR) - Jajaran Komisi A DPRD Kota Yogya bergerak mengumpulkan informasi terkait keresahan warga yang tinggal di sisi selatan Stasiun Lempuyangan. Para wakil rakyat itu pun menegaskan tidak boleh ada pelanggaran prosedur dalam bentuk apa pun.

Langkah awal yang tengah dilakukan ialah mendatangi warga yang tinggal di sisi selatan Stasiun Lempuyangan. Seperti diketahui, terdapat 14 rumah yang didiami puluhan kepala keluarga namun terancam pengusuran oleh PT KAI. Warga merasa terintimidasi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh PT KAI terkait rencana beautifikasi dengan mengosongkan tempat tinggal mereka. Alasannya, PT KAI telah mengantongi *palilah* dari Kraton selaku pemilik lahan. Akan tetapi warga juga lebih dulu memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kita harus mendudukan persoalan secara proporsional. Lahan ini kan statusnya Sultan Ground (SG). Sebelum ada kekancingan dari Kraton selaku pemilik lahan, maka semua



KR-Ardhi Wahdan

Komisi A DPRD Kota Yogya berdialog dengan warga di selatan Stasiun Lempuyangan.

pihak harus saling menahan diri. Tidak boleh asal mengklaim," tandas Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Indaruwanto Eko Cahyono, di sela berdialog dengan warga di selatan Stasiun Lempuyangan, Jumat (9/5).

Baik *palilah* maupun SKT, imbuh Ndaru sapaan akrabnya, menjadi bagian atau syarat untuk memproses kekancingan. Oleh karena itu warga yang menempati serta PT KAI sebenarnya berada pada posisi yang sama. Sehingga diharapkan tidak ada upaya yang melanggar prosedur sebelum pihak Kraton menjatuhkan kekancingan ke salah satu pihak, atau bahkan justru kepada pihak lain.

Sebagai tindak lanjut

dari pertemuan dengan warga tersebut, Ndaru mengaku akan melaporkan ke pimpinan dewan untuk langkah selanjutnya. Akan tetapi pihaknya juga sudah mengagendakan untuk memanggil PT KAI guna menggali informasi terkait rencana penataan Stasiun Lempuyangan yang tengah menjadi polemik karena diduga bakal diikuti pengusuran. Pemanggilan itu rencananya akan dilakukan pekan depan.

Sementara Ketua RW 01 Bausasaran Danurejan Antonius YH selaku wakil dari warga setempat, meyakini jika Ngarsa Dalem selaku Raja Ngayogyakarta sekaligus Gubernur DIY akan berpihak pada rakyat.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005